

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan ekonomi daerah dirancang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang di revisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaan. Dengan diadakannya otonomi daerah diharapkan menjadi mandiri didalam pengelolaan keuangan. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau

dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan disini dapat berbentuk Provinsi, Kaben, atau Kota. Tidak dapat disangka bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah, wilayah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula ditingkatkan.²

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dijalankan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan

¹Riko Novianto, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan kinerja keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2005-2013", Jurnal Ekonomi, Vol 4. No 1 (Januari 2015), hal 2-3

²Sjafri, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 88-89

pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dengan mencegah ketimpangan antara daerah³.

³Edwin Kadafi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2005-2009", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, 2013), hal 2

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Investasi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT. Berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulnya (sunahnya), jika kamu benar-benaar beriman (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59⁴).

Sejarah Islam mencatat, perkembangan kebijakan fiscal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam. Pada zaman pertengahan ternyata peran

⁴Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Bandung : Diponegoro, 2005) h, 75

fiskal sangat penting untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat dan negara.

Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonstruksi disertai dengan pengalihan sumberdaya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran⁵.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka

⁵ Aries Djaenuri. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah* (Bogor. Ghalia Indonesia, 2012) Hal, 10

pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nanti.

Perubahan alokasi belanja modal ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan

pendapatan asli daerah (PAD)⁶. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik⁷.

Tabel 1.1
Data PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2015-2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

⁶ Yustikasari. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2007-2008”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2012), hal 25

⁷ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan provinsi Baten September 2018”, www.djpk.depkeu.go.id, diakses pada 11 Oktober 2019, Pukul 15.35 WIB

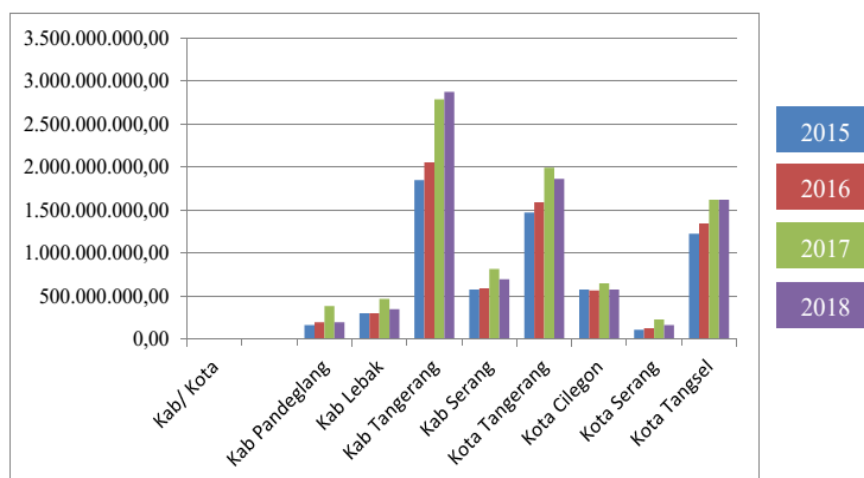
Kab/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	163,921,273,000	198,750,877,000	387,100,585,000	196,996,807,000
Kab Lebak	301,542,032,000	304,485,932,000	467,474,538,000	349,363,427,000
Kab Tangerang	1,851,195,177,000	2,054,715,996,000	2,786,647,280,000	2,872,568,513,000
Kab Serang	579,605,447,000	590,865,666,000	815,399,914,000	697,085,200,000
Kota Tangerang	1,471,944,384,000	1,590,080,330,000	1,991,898,969,000	1,864,385,585,000
Kota Cilegon	579,585,575,000	567,671,194,000	652,084,326,000	578,335,346,000
Kota Serang	111,062,807,000	126,900,900,000	232,458,208,000	164,218,549,000
Kota Tangsel	1,228,393,890,000	1,346,240,156,000	1,622,004,639,000	1,621,710,653,000

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Bante, Data

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah mengalami naik turun setiap tahunnya. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten harus mampu menggali pendapatan asli daerah yang lebih banyak lagi. Tujuannya agar mampu mencukupi semua kebutuhan daerah sehingga tidak bergantung pada dana perimbangan dari transfer pemerintah. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dan 2018 merupakan gambaran langkah kongkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Laju pertumbuhan pendapatan asli

daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahun nya. Pendapatan Asli Daerah tertinggi tahun 2018 pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 2,872,568,513 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Lima Ribu Tigabelas Rupiah) dan yang paling terendah terjadi pada tahun 2015 pada Kota Serang yaitu Rp. 111,062,807,000. (*Seratus Sebelas Miliar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*). Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikan belanja pemerintah terutama belanja langsung.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2015-2018
(Dalam Ribuan Rupiah)



Dari grafik di atas diketahui bahwa pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Banten jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang di wakili oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami naik turun dari tahun 2015 sampai 2018, jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif meningkat signifikan dan lebih tinggi dari daerah lain adalah Kabupaten Tangerang terjadi pada tahun 2018 pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 2,872,568,513,000 (*Dua Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tigabelas Ribu Rupiah*)

Sedangkan untuk jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah di Provinsi Banten adalah Kota Serang pada tahun

2015 Rp. 111,062,807,000. (*Seratus Sebelas Milyar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*)⁸. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka dampaknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada segala sektor dan akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintaha dan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Sektor yang paling dominan dalam memberikan kontribusi dalam atruktur pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

⁸ “Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten September 2018”, <http://banten.bps.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2019, Pukul 16.45 WIB.

Pendapatan asli daerah sangat berperan besar dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada beberapa komponen dalam Pendapatan Asli Daerah, di antaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Tabel 1.2

Data Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Tahun 2015-2018

(Dalam R ibuan Rupiah)

Kab/ Kota	DANA PERIMBANGAN			
	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	1,294,374,747,000	1,653,367,105,000	1,643,322,506,000	1,621,594,434,000
Kab Lebak	1,321,281,755,000	1,620,008,403,000	1,442,490,404,000	1,539,049,05,000
Kab Tangerang	1,496,375,511,000	1,843,722,483,000	1,928,590,448,000	1,758,969,673,000
Kab Serang	1,114,480,171,000	1,419,534,466,000	1,470,127,262,000	1,546,651,981,000
KotaTangerang	1,057,756,756,000	1,247,006,680,000	1,322,393,475,000	1,341,676,526,000
Kota Cilegon	578,569,090,000	891,105,528,000	847,021,220,000	841,804,103,000
Kota Serang	670,172,309,000	825,491,157,000	877,330,483,000	855,909,344,000
Kota Tangsel	707,496,060,000	847,221,054,000	867,028,622,000	889,139,727,000

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Bante, Data

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa Dana perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten mengalami naik turun di setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa transfer daerah terbesar tahun 2017 pada Kabupaten Tangerang sebesar RP. 1,928,590,448,000 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empatpuluh Delapan Ribu Rupiah*). Dan pada tahun 2015 dana perimbangan terendah adalah kota Cilegon sebesar Rp. 578,569,090,000 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*). Besar nya transfer ke daerah tersebut merupakan upaya Pemerintah mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiscal antar daerah yang selama ini masih terjadi, bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pepajakan/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Bagi hasil pajak/bukan pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 Wajib Pajak orang dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain. sedangkan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang berasal dari pendapatan iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provinsi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan penguasaan perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi⁹

Tabel 1.3
Data Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2015- 2018
(Dalam Ribuan Rupiah)

⁹ “Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten September 2018”, <http://banten.bps.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2019, Pukul 16.45 WIB.

Kab/ Kota	ALOKASI BELANJA MODAL			
	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	318,350,393,000	369,304,934,000	541,393,604,000	343,009,277,000
Kab Lebak	464,213,655,000	541,448,513,000	374,004,043,000	313,774,638,000
Kab Tangerang	1,585,911,127,000	1,410,376,721,000	1,530,660,350,000	1,763,560,497,000
Kab Serang	414,261,378,000	417,285,118,000	463,747,394,000	589,719,505,000
Kota Tangerang	605,278,286,000	933,923,684,000	1,013,676,204,000	1,024,749,199,000
Kota Cilegon	372,999,378,000	461,651,194,000	500,709,558,000	304,636,620,000
Kota Serang	183,910,388,000	169,833,426,000	333,541,135,000	431,082,095,000
Kota Tangsel	982,985,800,000	1,049,322,168,000	1,049,322,168,000	1,019,928,804,000

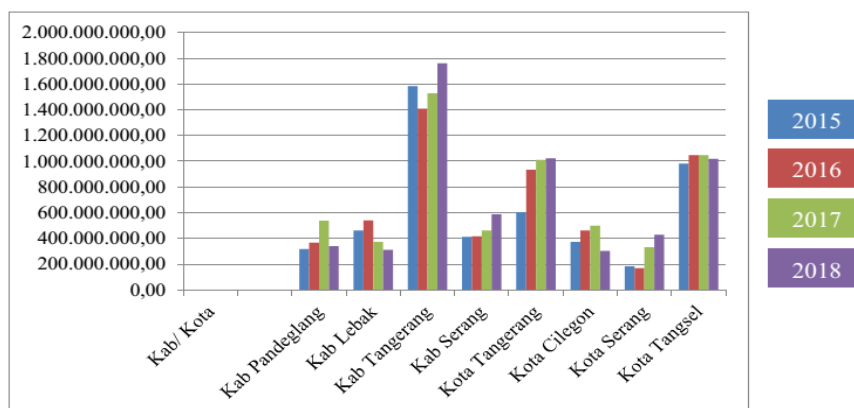
Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Bante, Data

Pada tabel 1.3 dapat kita lihat Anggaran Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami naik turun, hal tersebut dapat kita lihat pada tahun 2018 kontribusi terbesar Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 1,763,560,497 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*). Sedangkan kontribusi terendahnya pada Kota Serang pada tahun 2016 sebesar Rp. 167,833,426,000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Mila Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Duapuluh Enam Ribu Rupiah*)¹⁰. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran

¹⁰ Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten September 2018”, <http://banten.bps.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2019, Pukul 16.55 WIB.

tahun llau, transfer dari dana cadangan akan tetapi laju pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bukan hanya semata-mata disebabkan oleh laju pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) namum demikian juga Pemerintah daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten harusnya tetap berusaha lebih menekankan komponen pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan komponen lainnya untuk lebih memperkuat kemandirian pemerintah daerah.

Gambar 1.2
Data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2015-2018
(Dalam Ribuan Rupiah)



Pada gambar 1.2 di atas diketahui bahwa jumlah Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahun nya dari tahun 2015-2018 pada Kabupaten

Padeglang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan sedangkan pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2015-2018, jumlah Belanja Modal yang relatif meningkat signifikan dan lebih tinggi dari daerah lain adalah Kota Tangerang Selatan terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah Belanja Modal sebesar 2018 kontribusi terbesar Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 1,763,560,497,000 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) jumlah tersebut cukuplah besar. Sedangkan untuk jumlah Belanja Modal yang relatif rendah di Provinsi Banten adalah Kota Serang pada tahun 2016 sebesar Rp. 167,833,426,000 (*Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Duapuluh Enam Ribu Rupiah*).¹¹ Jika semakin besarnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) maka alokasi belanja modal pun akan meningkat jika hal tersebut dikatakan jika daerah tersebut sudah mencapai target utamanya dalam menjalankan dan mengalokasikan

¹¹ Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten September 2018”, <http://banten.bps.go.id/>, diakses pada 21 Oktober 2019, Pukul 16.55 WIB

pendapatan daerah untuk belanja publik maka pemerintah daerah tersebut sudah mencapai target. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan perkembangan pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah biasanya di jadikan tolak ukurnya karena pendapatan asli daerah ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah¹².

Menurut Halim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu : Suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah beserta urainya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas

¹² Mardianso, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta Andi, 2004), hal. 132

maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran biasanya satu tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam dan mengemukakannya dalam bentuk skripsi dengan judul *“Analisis Ekonomi Syariah Tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2015-2018)”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengidentifikasi hal yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota provinsi banten selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 tertinggi pada Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 2,872,568,513,000 dan tahun 2015 terendah pada Kota Serang pada tahun 2015 yaitu Rp. 111,062,807,000.

2. Dana Perimbangan di kabupaten/kota provinsi banten selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 tertinggi pada Kabupaten Tangerang sebesar RP. 1,928,590,448,000 dan tahun 2015 terendah pada Kota Cilegon sebesar Rp. 578,569,090,000
3. Perkembangan Belanja modal di kabupaten/kota provinsi banten selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 tertinggi Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 1,763,560,497,000 dan tahun 2016 terendah pada Kota Serang sebesar Rp. 167,833,426,000
4. Besarnya peningkatan pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pembiayaan daerah di kabupaten/kota provinsi bantentahun 2015-2018
5. Belum tercapainya realisasi pendapatan asli daerah sesuai target anggaran di kabupaten/kota provinsi banten tahun 2015-2018

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian dan kemampuan penulis dalam hal meneliti, pembatasan ini dilakukan supaya penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta bisa diketahui sejauh mana hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan dan juga untuk menciptakan keefektifan waktu dalam melakukan penelitian. Maka penulis membataskan penulisannya hanya pada ANALISIS EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN dan ALOKASI BELANJA MODAL pada tahun 2015-2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk lebih jelasnya masalah tersebut perlu dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2018 ?

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2018?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi banteh tahun 2015-2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-1018 .
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan Terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2018

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian. Juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, beserta pengelolaan keuangan daerah. Dan kaitannya dengan pembangunan daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan mengenai pengembangan atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga di masa mendatang daerah otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber pendanaan dan hasil kekayaan daerah masing-masing. Diharapkan konsep desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya.

3. Bagi Akademik

Sebagai pengetahuan untuk membawa wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan di buatnya penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori : Bab ini berisi mengenai penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian : Bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, pengujian Hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. .

BAB V Kesimpulan dan Saran : Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.